

ABSTRAK

Delyana Putri Maulina: *Tanggung Jawab Negara dalam Memenuhi Hak Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Tinjauan Siyasah Dusturiyyah (Studi di Yayasan Nur Jannah Cendekia, kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat).*

Anak terlantar adalah warga negara yang memiliki hak yang sama dan dijamin keberadaannya sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar menjadi tanggung jawab negara untuk dipelihara, tetapi pada faktanya masih ditemukan anak terlantar di Yayasan Nur Jannah Cendekia Lembang, Kabupaten Bandung Barat yang belum terpenuhi hak-haknya, sehingga belum menciptakan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan hak dokumen kependudukan bagi anak terlantar oleh Yayasan Nur Jannah Cendekia serta mengetahui dampak dan kendala pemenuhan hak dokumen kependudukan di Yayasan Nur Jannah Cendekia. Penelitian ini juga bertujuan untuk mencari jawaban dalam sudut pandang *siyasah dusturiyyah* terhadap pemenuhan hak anak terlantar dalam memperoleh dokumen kependudukan.

Teori yang digunakan oleh peneliti adalah teori perlindungan hukum, teori administrasi kependudukan, dan teori *siyasah dusturiyyah*. Teori perlindungan hukum digunakan untuk menjelaskan bagaimana masyarakat mendapatkan hak-haknya yang kemudian berimplikasi pada teori administratif bahwa perlindungan hukum itu harus tercatat. Sedangkan *siyasah dusturiyyah* membantu memahami bagaimana pelaksanaan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip keadilan (*al-'adl*), berangsur-angsur (*tadarruj*), dan tidak memberatkan (*adamul kharaj*).

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yaitu memadukan bahan hukum yang ada dengan fakta di lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif yang disajikan dalam bentuk analisis yang diambil dari data sekunder yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak dokumen kependudukan bagi anak terlantar di Yayasan Nur Jannah Cendekia belum berjalan secara maksimal karena banyak anak yang belum memiliki dokumen kependudukan karena berbagai alasan, hal ini tentu saja berdampak pada anak tersebut. Selain itu, kurangnya informasi mengenai prosedur serta kurangnya kelengkapan dokumen menjadi kendala Yayasan Nur Jannah dalam memenuhi hak-hak anak tersebut. Dari perspektif *siyasah dusturiyyah*, implementasi dokumen kependudukan berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan tersebut dapat diterapkan dimasyarakat selama tidak bertentangan dengan *syariat* dan ketentuan yang berlaku karena memberikan manfaat yang besar dan menghindarkan masyarakat dari segala bentuk kemudharatan.

Kata Kunci: Anak terlantar, Dokumen Kependudukan, *Siyasah Dusturiyyah*.